



Tujuh Pastor bersama tujuh Pendeta dari berbagai denominasi (Kristen) memimpin Ibadah Pekan Doa Sedunia untuk Kesatuan Umat Kristiani di Gereja Kotabaru, Yogyakarta.

KR-Franz Boedisukamanto

DOA BERSAMA DI TENGAH PANDEMI

Kesatuan Umat Kristiani Wartakan Kasih

YOGYA (KR) - Ibadah Pekan Doa Sedunia untuk Kesatuan Umat Kristiani berlangsung semarak dan hangat dengan kehadiran ratusan umat Kristen dari berbagai denominasi dan umat Katolik, Rabu (25/1) sore di Gereja Santo Antonius Padua Kotabaru. Ibadah dipimpin 7 Romo (Pastur) Katolik dan 7 Pendeta Kristen secara bergantian.

"Ibadah dan doa bersama ini dengan melihat situasi bangsa dalam krisis kemanusiaan di tengah pandemi Covid-19, dari kegelapan ini kita yakin dengan membangun kesadaran bersama umat yang percaya Yesus Kristus, kita akan melihat terang," tegas Vikep Kevikepan Yogyakarta Timur Rm Andrianus Maradiyo Pr dalam sambutannya.

Rm Maradiyo menegaskan ajaran kasih Yesus Kristus juga menghendaki umat Kristiani mengasihi umat beragama yang lain dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. "Bersatu saling menghormati," ujarnya.

Sementara Romo (Pastur) lainnya dari

Gereja Katolik yang memimpin doa/ibadah yaitu Rm Macarius Maharsono Probho SJ (Pastor Paroki St Antonius Kotabaru), Rm Martinus Joko Lelono Pr (Ketua Komisi HAK Kevikepan Yogyakarta Timur), Rm Stephanus Sigit Pranoto SCJ, Rm FX Alip Suwito Pr, (Ketua Rayon Kota) dan Rm Rosarius Sapto Nugroho Pr (Ketua Komisi PK3 Kevikepan Yogyakarta Timur, dan Rm Bernadus Agus Rukiyanto SJ.

Sedangkan 7 Pendeta (Kristen) yang turut memimpin ibadah yaitu Pdt Agus Haryanto (GKJ Demak Ijo) yang juga Ketua Umum BKSADK (Badan Kerja Sama Antar Denominasi Kristen), Pdt Yudo Aster Daniel, Pdt Fendi Susanto, GKJ Gondokusuman, Pdt Naftali (GKII Yogyakarta), Pdt Budi Karyanta (GPDI Hagios Family), Pdt Gunawan Adi Prabowo, (GKJ Sari-mulyo), Pdt Arief Arianto (GBI Teleios Yogya). "Puji Syukur di tengah pandemi bisa melakukan kegiatan bersama dengan prokes, jelang Juni-Juli 2022 nanti Yogya menjadi tuan rumah Pesparawi Nasional," ungkap Pdt Agus. (Vim)-d

MENTERI PP-PA:

45% Anak Korban Kekerasan Alami Kekerasan Seksual

YOGYA (KR) - Masalah kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia merupakan problema kompleks dan membutuhkan keterlibatan semua kalangan untuk memperhatikan secara khusus atas kasus tersebut.

Dalam penanganannya membutuhkan keterlibatan semua pihak khususnya dalam kerangka berpikir yang sama, bahwa kekerasan seksual merupakan kejahatan luar biasa karena merenggut kemerdekaan seseorang. Apalagi mengingat mayoritas anak perempuan mengalami kekerasan seksual yang mencapai 45 persen.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga SE MSi mengemukakan hal tersebut ketika menjadi keynote speech webinar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Selasa (25/1).

Webinar diselenggarakan Pusat

Studi Muhammadiyah (PSM) UMY bertajuk 'Negara dan Peran Muhammadiyah dalam Perlindungan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak-anak'. Webinar dibuka Rektor UMY Prof Dr Gunawan Budiyanto dan menghadirkan narasumber di antaranya Komisioner KPAI Dr Jasra Putra, Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Aisyiyah Dr Atiyatul Ulya MAG dan lainnya.

Salah satu faktor terus hadir dan meningkatnya kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak, disebut Bintang Puspayoga, adalah konstruksi sosial patriarkis yang menempatkan perempuan dan anak pada berbagai kerentanan

yang mengancam kualitas hidupnya. "Ketimpangan relasi kuasa merupakan akar dari fenomena kekerasan termasuk kekerasan seksual yang mengancam kehidupan anak-anak dan perempuan Indonesia sejak dulu hingga hari ini," jelas Menteri PP-PA.

Selama pandemi Covid-19 kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak terus meningkat. Dari jumlah kasus meningkat 18,32 persen pada kasus perempuan, 28,54 persen pada kasus anak. Sementara jumlah korban meningkat 17,97 persen pada kasus perempuan serta korban anak meningkat 28,72 persen.

"Presentasi perempuan korban kekerasan yang melaporkan menurut jenis kekerasan pada tahun 2021 antara lain 39 persen perempuan mengalami kekerasan fisik, 30 persen mengalami kekerasan psikis, 12 persen mengalami kekerasan

seksual, 10 persen mengalami penelantaran, dan 2 persen mengalami tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Sedangkan kekerasan yang dialami anak mayoritas mengalami kekerasan seksual dengan persentase sebanyak 45 persen, psikis 19 persen, fisik 18 persen dan penelantaran anak 5 persen," tambahnya.

Kadiv Wasmonex KPAI Dr Jasra Putra menyampaikan pentingnya sinergitas Muhammadiyah dan Aisyiyah dengan Pemerintah. "Pemerintah harus memperhatikan dan melibatkan suara anak dalam proses-proses kebijakan agar pembangunan bisa dinikmati semua kalangan termasuk anak, sehingga kita mengerti lanjutnya apa sesungguhnya yang diinginkan oleh anak ke depan," katanya seraya berharap pada tahun 2030 Indonesia Layak Anak dapat tercapai di semua tingkatan masyarakat. (Fsy)-f

PROGRAM PADAT KARYA 2021

Serap 1,8 Juta Pekerja

JAKARTA (KR) - Program Padat Karya 2021 telah menyerap 1,8 juta pekerja. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melaksanakan program pembangunan infrastruktur kerakyatan dengan pola padat karya melalui 20 kegiatan yang tersebar di 33 provinsi, dengan keseluruhan penerima manfaat sebesar 1,8 juta pekerja.

Demikian Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (25/1). Menteri PUPR menyampaikan rincian realisasi pelaksanaan Program Pola Padat Karya 2021 di Bidang Sumber Daya Air telah menyerap 361.771 pekerja. Sedangkan realisasi di Bidang Cipta Karya menyerap 417.381 pekerja, kemudian realisasi Bidang Bina Marga menyerap 749.299 pekerja, dan Bidang Perumahan menyerap 266.394 pekerja.

Menurut Basuki, Program Infrastruktur Kerakyatan atau Padat Karya Tunai (PKT) dinilai sangat penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang berada di pedesaan di tengah pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Pembangunan infrastruktur padat karya, selain untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, juga bertujuan mengurangi pengangguran. Pola pelaksanaan Padat Karya Tunai ini juga harus memperhatikan protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran Covid-19. (Ati)-d

JAKSA DAKWA TERIMA SUAP RP 18,7 M

Bupati Banjarnegara Disidangkan

SEMARANG (KR) - Bupati Nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono didakwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) menerima suap sebesar Rp 18,7 miliar dan gratifikasi Rp 7,4 miliar yang diduga sebagai fee atas berbagai pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara.

Pada sidang yang berlangsung secara hybrid di Pengadilan Tipikor Kota Semarang, Selasa (25/1), anggota tim JPU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Heradian Salipi mengatakan, terdakwa I Budhi Sarwono dan terdakwa II Kedy Afandi dari pihak swasta mengikutsertakan serta mengatur agar ketiga perusahaan itu memperoleh pekerjaan proyek yang dibiayai APBD.

"PT Sutikno Tirta Kencana, PT Buton Tirta Baskoro dan PT Bumi Redjo, tempat terdakwa I selaku penerima manfaat dari perusahaan tersebut memperoleh pekerjaan yang seluruhnya berjumlah Rp 93,9 miliar serta mendapatkan keuntungan finansial dari paket pekerjaan dengan total Rp 18,7 miliar," papar Jaksa.

Selain itu, terdakwa I Budhi Sarwono bersama terdakwa II Kedy Afandi juga telah

menerima gratifikasi dalam bentuk uang Rp 7,4 miliar dari beberapa pihak. Atas perbuatannya, Jaksa menjerat kedua terdakwa dengan Pasal 12 atau Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atas dakwaan JPU, terdakwa Budhi Sarwono yang mengikuti sidang secara daring itu, menolak semua dakwaan. "Saya tidak pernah melakukan seperti apa yang didakwakan Jaksa," kata Budhi Sarwono yang berada di Gedung KPK, Jakarta.

Majelis hakim yang diketuai Hakim Ketua Rohmad serta hakim anggota NGR Rajendra dan Lujianto menunda sidang dan akan dilanjutkan Jumat (4/2) dengan agenda mendengarkan saksi-saksi yang diajukan jaksa.

Secara khusus, Hakim Ketua Rohmad juga meminta jaksa agar menghadirkan kedua terdakwa pada sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Semarang. Menganggapi permintaan itu, Jaksa Heradian Salipi berpendapat, terdakwa Budhi Sarwono lebih baik tetap di Rutan KPK pada Kavling C1.

(Ant)-f

BELANJA KEMENTERIAN DAN LEMBAGA

Anggaran Rp 39,71 T Diblokir Sementara

JAKARTA (KR) - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata memblokir sementara anggaran belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) senilai Rp 39,71 triliun.

Pemblokiran ini dilakukan dalam rangka penerapan kebijakan 'automatic adjustment' atau penyesuaian otomatis untuk menggantikan kebijakan refocusing anggaran yang membuat Kementerian dan Lembaga tidak dapat bekerja dengan baik di tahun sebelumnya.

"Tahun ini kita minta setiap Kementerian dan Lembaga untuk memilih program yang paling tidak prioritas sehingga bisa menyisihkan 5 persen dari anggaran mereka untuk tidak disalurkan terburu-buru," kata Isa dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa (25/1).

Anggaran tersebut baru dapat digunakan saat Pemerintah merasa tidak akan melakukan refocusing dan

realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mengatasi pandemi Covid-19 ataupun kebutuhan mendesak lain selepas Semester I-2022.

Menurutnya, kebijakan ini diambil setelah pada tahun lalu Pemerintah baru melakukan refocusing dan realokasi anggaran, dengan mengurangi anggaran beberapa Kementerian dan Lembaga, ketika perekonomian telah kembali terdampak oleh lonjakan kasus Covid-19 akibat penyebaran varian Delta.

Kebijakan 'automatic adjustment' pun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN Tahun Anggaran 2022, tepatnya pada Pasal 28 Ayat 2. Anggaran yang disisihkan oleh setiap Kementerian dan Lembaga untuk kebijakan ini tetap dapat digunakan, tetapi nanti, saat Pemerintah melalui Kementerian Keuangan melakukan tidak akan

melakukan refocusing dan realokasi selepas Semester I-2022.

"Anggaran ini tetap ada di Kementerian dan Lembaga, tapi di Semester I-2022 ini belum bisa dimanfaatkan oleh mereka. Nanti kita akan rilis apabila kita cukup percaya diri bahwa kita bisa mengendalikan pandemi dan kebutuhan pemulihan ekonomi nasional sampai akhir tahun," ucapnya.

Terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Isa Rachmatarwata menyampaikan, total PNBP dari keseluruhan sektor nonmigas diharapkan dapat mencapai Rp 36,04 triliun pada 2022. Dari sektor mineral dan batu bara Rp 28,01 triliun, sektor kehutanan Rp 4,85 triliun, sektor perikanan Rp 1,6 triliun, dan panas bumi Rp 1,55 triliun. Sedangkan PNBP dari sektor migas diharapkan mencapai Rp 85,90 triliun. Jadi total PNBP dari sumber daya alam dapat mencapai Rp 121,95 triliun pada 2022. (Ant/San)-d

PERTIKAIAN DI SORONG

17 Jenazah Dievakuasi

SORONG (KR) - Kepolisian Resor Sorong Kota mengevakuasi 17 jenazah korban terjebak di tempat hiburan Karaoke Double0 yang dibakar massa akibat pertikaian dua kelompok warga di Kota Sorong, Papua Barat, Selasa (25/1).

Jenazah 17 korban yang belum diketahui identitasnya itu dievakuasi dari lokasi kejadian Karaoke Double0 di Jalan Sungai Maruni Kota Sorong menuju kamar jenazah RSUD Sele be Solu menggunakan tiga mobil jenazah.

Proses evakuasi korban pun dikawal mobil patroli Polres Sorong Kota dan Polsek Sorong Timur dari lokasi kejadian menuju RSUD Sele be Solu Kota Sorong untuk dilakukan identifikasi. Lokasi kejadian langsung diberi garis polisi dan puluhan anggota Polres Sorong Kota berjaga-jaga di lokasi.

Kabag Ops Polres Sorong Kota Kompol Edward Martua Pandjaitan mengatakan, pihaknya sudah mengevakuasi korban yang terjebak dalam Karaoke Double0 akibat pertikaian antardua kelompok warga. Berdasarkan hasil olah TKP Tim Dokter dan Reskrim Polres Sorong Kota serta Polsek Sorong Timur dilaporkan ada 17 jenazah ditemukan dalam keadaan hangus terbakar.

Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing usai mengunjungi lokasi Karaoke Double0 yang dibakar massa langsung menuju RS Sele be Solu guna melihat proses identifikasi korban. Terdapat 18 korban dalam peristiwa naas tersebut. Satu korban bentrok dan 17 merupakan korban yang terbakar akibat terjebak dalam Karaoke Double0. Dari 17 korban itu, tiga di antaranya merupakan tamu dan sisanya sebagai karyawan. (Ant/San)-d

POLISI PERIKSA 11 ORANG

Dugaan Perbudakan Bupati Langkat

JAKARTA (KR) - Pihak kepolisian Polda Sumatera Utara telah memeriksa 11 orang terkait temuan tempat binaan di rumah bekas Bupati Langkat, Terbit Rencana Peranginangin, yang diduga menjadi tempat perbudakan.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan menyebutkan, pemeriksaan itu dalam rangka meminta keterangan sejumlah pihak yang ditemui di lokasi yang disebut sebagai tempat pembinaan itu. "Terkait dengan penemuan tempat binaan milik eks Bupati Langkat, telah diperiksa dan diambil keterangannya. Semuanya 11 orang," kata Brigjen Ramadhan, di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (25/1).

Menurutnya, pihak-pihak yang dimintai keterangan itu di antaranya pengurus tempat pembinaan, termasuk 'warga binaan' yang mengikuti pembinaan di tempat itu. Kemudian kepala desa setempat, Sekdes dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Langkat.

Sebelumnya, Polda Sumatera Utara membentuk tim gabungan yang terdiri Direktorat Kriminal Umum, Direktorat Narkoba, Intelijen dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait guna mendalami informasi temuan tempat binaan di rumah bekas Bupati Langkat. Dari hasil temuan sementara, tempat binaan tersebut berada di lahan seluas satu hektare, terdapat dua bangunan dengan ukuran 6x6 meter persegi yang terbagi dua kamar. Antarkamar dibatasi jeruji besi selayaknya bangunan sel. Ruang itu berkapasitas lebih dari 30 orang.

"Setelah ditelusuri, bangunan tersebut telah dibuat sejak 2012 atas inisiatif bupati dan belum terdaftar dan belum memiliki izin sebagaimana diatur dalam undang-undang," ujar Ramadhan. (Ful/Ant)-d



KR-Antara/Andreas Fitri Altmoko

PRODUKSI KUE KERANJANG: Pekerja merapikan bungkus plastik kue keranjang di rumah industri kawasan Tukangan, Yogyakarta, Selasa (25/1). Jelang Imlek 2022, industri rumahan kue keranjang tersebut Covid-19 dan berproduksi selama tahun lalu tidak produksi karena pandemi Covid-19 dan menjual kue dengan harga Rp 45.000/kotak.